

BAB 3

WACANA NASIONALISME INDONESIA DALAM PANDANGAN PARA TOKOH ORDE BARU

Orde Baru tampil di atas panggung politik Indonesia dengan latar belakang peristiwa yang memilukan, yaitu tragedi pembunuhan massal yang biasa disebut Peristiwa G30S/PKI. Dimulai pada akhir September 1965, pembunuhan berakhir pada Januari 1966, dengan meninggalkan korban kematian yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Sebagian besar ahli memperkirakan, sedikitnya setengah juta orang tewas dalam tragedi ini (Ricklefs, 2005: 566). Sebagian masyarakat merasa bangga bisa membantu membasmi PKI, tetapi sebagian yang lain merasakan bahwa pembunuhan massal ini merupakan peristiwa paling memalukan dan tidak dapat dimaafkan. Banyak orang ditahan, diinterogasi, namun sebagian besar tidak diadili dan langsung dijebloskan dalam penjara.¹

Peristiwa ini telah memperlemah pemerintahan Soekarno, dan seterusnya menekan Soekarno untuk melepaskan kekuasaan yang dimilikinya. Ujungnya adalah terbitnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan negara serta Presiden Soekarno dan keluarganya. 12 Maret, PKI dan semua organisasi massanya dilarang. Pada 18 Maret, Soebandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri kabinet lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tetapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul saleh mati di penjara tahun 1967. Orang-orang yang beraliran Soekarno moderat tidak ditahan; seperti Idham Chalid, Leimena, Roeslan Abdulghani tetap berada di kabinet yang baru dilantik pada 27 Maret. Kabinet ini dipimpin oleh tiga serangkai, yaitu Soeharto, Sultan Hamengku Buwana IX dan Adam malik. Pada saat yang sama, pemebersihan tentara dan

¹ Ekses dari peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Di samping taruma mendalam dirasakan para anggota keluarga yang salah satu dari keluarga mereka terkena kasus PKI, juga sangat banyak orang menjadi tahanan (dan kemudian menjadi narapidana) politik memenuhi sel-sel tahanan dan barak-barak tentara. Pada akhir tahun 1977, Amnesty Internasional memperkirakan narapidana politik Indonesia berjumlah antara 55.000 hingga 100.000 orang. Pada tahun 1977 terdapat sekitar 14.000 narapidana di Pulau Buru, salah satunya adalah Pramodya Ananta Toer yang selama dalam penjara menulis novel sajarah yang terkenal dengan tetralogi; *Bumi Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca*. (Ricklefs, 2005: 583)

birokrasi dimulai. Sekitar 2.600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak yang lainnya ditahan. Para diplomat yang terkait dengan Cina secara formal 'dibekukan' oleh Soeharto pada 31 Oktober 1967, setelah terjadi gelombang kerusuhan anti-Cina. (Ricklefs, 2005: 569)

Pada bulan April 1966 Indonesia bergabung lagi dengan PBB, dan Soeharto menyatakan mendukung berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia. Delegasi perwira senior berkunjung ke Malaysia untuk menunjukkan itikad baiknya. Tanggal 29 Mei, Adam malik bertemu dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak di Tokyo Jepang. Jepang sendiri langsung menyatakan dukungannya kepada pemerintahan non-komunis Orde Baru dengan menawarkan utang darurat sebesar US\$ 30 juta. Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia dipastikan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian 11 Desember. Dan hubungan diplomatik penuh antara Indonesia dan Malaysia dipulihkan pada bulan Agustus 1967. Bulan Mei 1966 Adam Malik mengumumkan bahwa Indonesia bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF). (Ricklefs, 2005: 571)

Semakin menguatnya kendali Orde Baru berjalan seiring dengan semakin menyusutnya kekuatan pendukung Soekarno dan elemen kiri lainnya. Prospek Orde Baru Soeharto untuk memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia Barat juga semakin meningkat. Salah satu masalah yang dihadapi Orde Baru saat itu adalah besarnya jumlah utang luar negeri warisan pemerintahan sebelumnya, yang besarnya mencapai US\$ 2,36 miliar pada akhir tahun 1965. Sebagian besar (59%) merupakan utang dari negara komunis, dan 24,9 persen berasal dari negara-negara Barat. Menghadapi hal ini, para kreditor nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama-sama yang akhirnya membentuk IGGI (*International Governmental Group on Indonesia*) pada tahun 1967. Langkah pertama kelompok ini adalah menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara Barat, pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus dipuji-puji oleh Bank Dunia dan IMF. Langkah-langkah ini mendominasi kebijakan ekonomi pada tahun 1970-an. Tetapi, menurut Riklefs (2005), yang terpenting dari kebijakan-kebijakan ini adalah:

...hadirnya sekelompok ahli ekonomi Indonesia yang terdidik secara akademis, para teknokrat yang dikenal dengan 'mafia Berkeley' karena beberapa diantara mereka lulusan Universitas Berkeley. Karena mereka mampu berbicara dalam bahasa ekonomi internasional, mereka menambah kredibilitas pemerintahan Soeharto di mata negara-negara Barat. Mereka juga tetap berpengaruh dalam rezim yang didominasi militer itu, walaupun terkadang ditentang oleh orang-orang yang lebih mendukung nasionalisme ekonomi yang lebih besar. (Ricklefs, 2005: 573)

Bersamaan dengan upaya-upaya pencarian dukungan dana dari dunia internasional, Soeharto juga terus melakukan reorganisasi birokrasi dan militer. Tahap akhir reorganisasi terjadi pada tahun 1969-1970. Para komandan keempat angkatan diganti, dan kekuasaan Departemen Pertahanan dan Keamanan terhadap komandan-komandan regional dan semua angkatan bersenjata ditingkatkan. Para pendukung setia Soeharto menguasai angkatan darat, sementara kepala staf angkatan laut yang baru adalah kolega lama Soeharto, Laksamana Soedomo. Pada bulan Oktober 1970, Soeharto menurunkan usia pensiun perwira menjadi 48 tahun dan mengumumkan bahwa 86 jendral akan pensiun dalam dua tahun ke depan. Sejak saat itu, militer menjadi begitu terpusat, sedemikian rupa sehingga perselisihan antarfaksi di dalamnya hampir tidak terlihat.

Pada bulan November 1969, DPR-GR mengeluarkan Undang-undang pemilihan umum yang menetapkan keanggotaan dari parlemen yang baru, dengan komposisi; 360 anggota dipilih, ditambah 100 anggota yang diangkat. Seluruh anggota ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 207 militer dan anggota golongan fungsional yang dipilih oleh Presiden, 131 anggota yang dipilih oleh DPRD, 112 anggota yang dipilih menurut hasil perolehan suara partai pada Pemilu, dan 10 anggota yang dipilih dari partai-partai yang kurang berhasil. Dengan demikian, pemerintah menunjuk langsung 22 persen anggota DPR dan 33 persen anggota MPR; suatu jumlah yang cukup untuk menggagalkan amandemen undang-undang. Pada bulan Februari 1970, pemerintah mengumumkan bahwa semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah, dan tidak diizinkan bergabung dalam parpol selain dengan Golkar. Untuk lebih memastikan hasil Pemilu 1971, para perwira militer dan pejabat-pejabat daerah diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Hasilnya, pada Pemilu yang

diselenggarakan pada Juli 1971 Golkar meraup 62,8 persen suara, memenangkan 236 (65,6 persen) dari 360 kursi yang diperebutkan. PNI memperoleh 6,5 persen, NU memperoleh 18,7 persen.

Dengan perolehan suara seperti itu, Orde Baru semakin memantapkan posisi kekuasaannya dengan melakukan penataan ulang perpolitikan nasional secara menyeluruh. Diantaranya adalah dengan penetapan asas tunggal Pancasila, penyederhanaan (fusi) partai politik, kebijakan massa mengambang (*vloating mass*) sambil tetap mempertahankan dominasi militer dalam bidang politik dengan konsep dwifungsi ABRI. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah Orde Baru bukannya tanpa tantangan dan kritik. Untuk menghadapi tantangan dan kritik itu para konseptor Orde Baru seperti Ali Moertopo melawan dengan membuat 'garis pemisah' antara kawan dan lawan secara lebih tegas; pada satu sisi mengkonstruksi para pengkritik dan lawan politiknya sebagai 'kekuatan lama', 'komunisme', 'anti-pembangunan', dan sebagainya, sambil pada sisi lain mengkonstruksi Orde Baru sebagai kekuatan 'pembangunan', 'menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen', 'pembaharu', 'anti-komunisme' dan sebagainya.

Paragraf-paragraf yang akan dikutip dan dibahas di bawah ini merupakan cerminan dari konstruksi para elite Orde Baru, bagaimana mereka mengkonstruksikan dirinya sendiri di dalam rangka mencari legitimasi dan dukungan bagi kekuasaannya, sambil pada sisi yang lain mengkonstruksi para lawan politik dan pengkritiknya di pihak lain. Salah satu tafsir tersebut, antara lain sebagaimana ditunjukkan oleh Bourchier dan Hadiz (2002: 9), bahwa dengan cara begitu memungkinkan pemerintah Orde Baru menggolongkan oposisi terhadap dirinya atau terhadap program-program pembangunannya sebagai bukan hanya tidak setia, melainkan juga meremehkan norma-norma budaya Indonesia, dan karena itu tidak dibenarkan, bahkan harus diluruskan.

A. Indonesia Tanpa Komunisme: Membaca Ide Ali Moertopo

Dalam forum kursus *upgrading* karyawan teras ABRI tingkat pusat yang diselenggarakan pada 20 Agustus dan 17 Oktober 1970, Ali Moertopo menyampaikan satu ceramah yang diberi judul '*Politik Nasional: Strategi,*

*Taktik dan teknik Implementasinya*². Pada kesempatan itu, Ali Moertopo mengemukakan sejarah perpolitikan nasional sejak awal kemerdekaan hingga kemudian digantikan oleh pemerintah Orde Baru. Secara reflektif, Moertopo memaparkan betapa Indonesia sejak kemerdekaan selalu dirongrong oleh konflik-konflik politik yang membahayakan stabilitas, bahkan persatuan dan kesatuan nasional. Salah satu kekuatan politik yang selalu mengancam tersebut adalah komunisme. Menurutnya kemunculan komunisme, antara lain juga disebabkan oleh sistem politik yang dikembangkan oleh pemerintahan saat itu. Ia mengatakan:

...pemberontakan komunis di Madiun tahun 1948 berusaha menghentikan atau menyelewengkan cita-cita bangsa.Sistem ini telah membuka peluang bagi komunisme untuk timbul kembali dan telah membuka kemungkinan timbulnya bermacam-macam pemberontakan, serta menimbulkan kemacetan dalam Konstituante dan mengakibatkan pergantian-pergantian kabinet setiap tahun. Kestabilan politik tidak berhasil diciptakan sehingga keadaan ekonomi dan pembangunan terbengkalai.

Kritik berikutnya lebih ditekankan lagi oleh Ali Moertopo kepada orde pemerintahan Soekarno yang tidak mampu menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dekrit Presiden 1959, yang mengamanatkan Negara untuk kembali perpijak pada Pancasila dan UUD 1945, tidak mampu dijalankan melainkan hanya 'semboyan kosong'. Hal itu antara lain terbukti dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah saat itu, seperti pembubaran parlemen, pemberangusan kebebasan pers, 'pengambilalihan' kekuasaan MPRS oleh 'pemimpin besar revolusi', dan secara internasional telah membelokkan arah politik nasional yang bebas aktif ke poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Moertopo mengatakan:

² Sumber bacaan ini berasal dari ceramah yang disampaikan Brigadir Jendral Ali Moertopo pada kursus upgrading karyawan teras ABRI tingkat pusat yang diselenggarakan di Jakarta antara 20 Agustus dan 17 Oktober 1970. Bacaan berikut diambil dari Bourchier & Hadiz (2006: 58-61), sebelumnya merupakan naskah 'terbatas' karya Ali Moertopo yang berjudul *Politik Nasional: Strategi, Taktik dan Teknik Implementasinya* (1970: 17-20).

Berlakunya kembali UUD 1945 yang didekritkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan suatu titik terang dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, namun demikian pelaksanaannya jauh dari konsekuen.

Pancasila dan UUD 1945 dijadikan semboyan kosong belaka, dan sebagai gantinya diisi dengan Nasakom. Demokrasi yang harus dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijadikan Demokrasi Terpimpin, kedaulatan yang ada di tangan rakyat diganti oleh suara ‘penyambung lidah rakyat’, Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum dibubarkan, kebebasan pers ditiadakan, hukum konstitusional diganti oleh hukum revolusi, presiden diangkat oleh hukum revolusi, kekuasaan MPRS berpindah ke tangan ‘pemimpin besar revolusi’, prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dikhianati oleh politik konfrontasi dan politik bebas aktif dijadikan politik luar negeri berporos Jakarta-Peking-Pyongyang.

Situasi inilah yang, menurut Moertopo, mendorong kekuatan Orde Baru—yang kemudian ia sebut sebagai ‘koalisi pembaharuan’—untuk tampil sebagai penyelamat negara, negara menegakkan ketertiban, baik di bidang ideologi, politik, hukum, sosial maupun pendidikan. Pendek kata, Orde Baru tampil sebagai orde pemerintahan yang hendak menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, dan melakukan koreksi total atas ideologi, politik dan pemerintahan, hukum, sosial dan pendidikan diperlukan. Moertopo mengatakan:

Dengan latar belakang tanggapan historis ini dapat dimengerti mengapa Orde Baru sepakat bahwa yang terpenting dan yang paling pokok adalah perombakan mentalitas yang telah mempolakan tingkah laku. Orde Baru sepakat untuk secara bertahap kembali ke Demokrasi Pancasila, harus mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau pribadi, harus kembali kepada semangat kerja yang berorientasi pada program...

Untuk lebih memperjelas dan memperkuat posisi Orde Baru, Moertopo lalu membuat ‘garis demarkasi’ yang jelas, untuk mengklasifikasi dan mengkonstruksi mana yang menjadi pendukung Orde Baru dan mana yang menjadi musuh Orde Baru. Ia menolak adanya kekuatan yang banyak (pluralisme) dalam politik Indonesia, karena menurutnya yang ada, hanyalah

dua kekuatan (dualisme) yang saling berhadapan. Penentang Orde Baru diklasifikan sebagai orde lama yang terdiri atas mereka yang berideologi komunis, PKI, yang mengkultuskan individu Soekarno, termasuk para oportunis di sekeliling Soekarno. Sementara yang pro Orde Baru adalah mereka yang antikomunis atau nonkomunis, dan orang-orang yang antikonsepsi Bung Karno. Berikut pernyataan Moertopo:

Orde Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruang lingkup nasional. Pertentangan ini bersifat pertentangan antara dua aspirasi yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Sumber pertentangan itu telah ada sebelumnya dan terlihat dari dualisme bahkan pluralisme nasional di segala bidang kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer.

Pertentangan nasional antara dua aspirasi ini diwakili oleh dua kelompok dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai Orde Lama dan Orde Baru. Ada pun kekuatan Orde Lama itu terpusat sekitar orang-orang yang berideologi komunis dengan tulang punggung PKI beserta ormas-ormasnya, bersama dengan orang-orang yang mengkultuskan individu Presiden Soekarno dan konsep-konsep politik Nasakom, Nefo, Dekon dan sebagainya. Dalam kelompok ini juga termasuk orang-orang oportunis yang hanya berpikiran untuk menggunakan kesempatan-kesempatan guna memperoleh keuntungan secara politis atau pun ekonomis, seperti Karkam dan Aslam.

Sebaliknya kekuatan-kekuatan Orde Baru adalah golongan-golongan serta perorangan yang antikomunis atau nonkomunis beserta organisasi-organisasinya, termasuk pula golongan-golongan ekstrem dan orang-orang yang antikonsepsi politik Bung Karno.

Dari teks ini, ada satu hal penting yang bisa ditangkap, berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang dibayangkan oleh penulisnya, yang dia adalah seorang konseptor utama Orde Baru. Yaitu, ia hendak mengarahkan semangat kebangsaan untuk mendukung kehadiran satu rezim pembangunan yang militeristik sekaligus anti komunis. Dengan memproklamirkan komunisme sebagai musuh bersama, penulis juga hendak memapankan satu orde pemerintahan yang ia asumsikan sebagai rezim alternatif, yang melakukan koreksi total atas situasi politik yang ada pada saat itu. Rezim tersebut tak lain adalah Orde Baru.

B. Indonesia Yang Modern: Membaca Ide Ali Moertopo

Pemikiran penting lain berkaitan dengan pemaparan Orde Baru dapat dilihat dalam satu tulisan Ali Moertopo yang terkenal di kalangan para Indonesianis berjudul, *The Acceleration and Modernization of 25 Years' Development* yang pertamakali diterbitkan pada 1972, dan versi bahasa Inggrisnya pada 1973.³ Seperti tampak dari judulnya, dalam tulisan ini Moertopo mengemukakan tentang pentingnya melakukan akselerasi modernisasi di tengah masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih tradisional. Modernisasi dianggap merupakan satu keharusan yang tak bisa ditawar. Termasuk di dalamnya adalah mengubah norma-norma yang sudah hidup bertahun-tahun di tengah masyarakat Indonesia, yang dianggap sudah tidak sesuai bahkan menghambat proses pembangunan nasional. Jika terjadi benturan-benturan akibat modernisasi, hal itu menurut Moertopo, merupakan suatu konsekuensi yang harus dibayar. Yang penting adalah bahwa, dalam kerangka modernisasi itu haruslah ada suatu *perencanaan perubahan sosio kultural, dan perencanaan perubahan secara umum*, sehingga modernisasi sebagai *planned change* harus jelas menentukan arah yang akan dituju. Berikut pernyataan Ali Moertopo:

Dalam masyarakat Indonesia yang umumnya masih tradisional, modernisasi merupakan dan menuntut terjadinya *perubahan dan pembaharuan sistem nilai-nilai*. Dengan demikian modernisasi berarti mengubah norma-norma yang tidak berfungsi lagi dalam perkembangan masyarakat serta norma-norma yang menghambat perkembangan. Perubahan harus terjadi dalam lingkup perubahan integral dan tidak saja terbatas pada perubahan dalam aspek kehidupan sosio-kultural tetapi mencakup pula aspek-aspek teknis, ekonomis, politis dan lain-lainnya. Adalah kenyataan bahwa dalam mengadakan perubahan-perubahan integral, waktu dan kehendak yang terdapat dalam masing-masing aspek tidak selalu berjalan secara sinkron...

³ Versi lengkap tulisan dan pemikiran Ali Moertopo tentang pembangunan nasional tersebut, diterbitkan dalam; Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1981. Dalam keterangan buku—yang diterbitkan dalam rangka 10 tahun CSIS—tersebut dinyatakan: “Untuk mereka yang secara jujur, tulus ikhlas dan penuh keyakinan berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara”. Moertopo, Ali. Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS, 1981

...modernisasi menuntut adanya sikap terbuka terhadap pengaruh dan kebudayaan asing, adanya dukungan yang kuat dari pemimpin-pemimpin yang progresif yang dapat menghidupkan satu etos kemajuan dan semangat bekerja. Semua ini perlu berorientasi pada suatu zaman baru, atau masa depan, dengan meninggalkan idealisasi zaman lampau. Dengan sendirinya proses modernisasi tidak terlepas dari konflik-konflik yang timbul akibat proses ini, dimana norma-norma baru akan berkonflik dengan norma-norma tradisional. Oleh karenanya proses modernisasi memerlukan *perencanaan perubahan sosio kultural, dan perencanaan perubahan secara umum*. Modernisasi sebagai *planned change* harus jelas menentukan arah yang akan dituju.

Penjabaran atas makna ‘perencanaan perubahan sosio kultural’ dan ‘perencanaan perubahan secara umum’ tersebut kemudian diartikan sebagai ‘penataan kehidupan politik’, ‘pengorganisasian kekuatan-kekuatan sosial politik’, ‘struktur politik’ dan kemudian ‘membina cara berpikir dan mental politik’, sehingga masyarakat memiliki cara berpikir yang ‘lebih matang’. Hal ini penting dilakukan, karena menurut Moertopo, agar jangan sampai ‘kepentingan pembangunan’ dikorbankan oleh ‘kepentingan politik’. Hal ini tampak dari pernyataan Moertopo berikut:

Dalam kehidupan politik, tujuan yang hendak dicapai adalah penataan kembali kehidupan politik, pengorganisasian kekuatan-kekuatan sosial politik struktur politik dan bersamaan atau berangsur-angsur membina cara berpikir dan mental politik sehingga keadaan sosial politik mantap dan matang untuk mendukung pembangunan masyarakat. Dengan demikian tidak terulang kenyataan dimana pembangunan justru dikorbankan demi kepentingan politik yang sama sekali tidak berimpit dengan kepentingan pembangunan.

Sekali lagi Moertopo menegaskan bahwa sikap Orde Baru (yang disebut ‘itikad bangsa’) adalah menolak gagasan demokrasi liberal, dan juga menolak demokrasi terpimpin yang memungkinkan terjadinya kekuasaan mutlak di tangan penguasa atau kekuasaan tunggal. Sebaliknya Orde Baru berkeinginan agar rakyat banyak dapat berpartisipasi positif dalam program pembangunan, tetapi arahnya adalah untuk pembangunan daerahnya masing-masing. Untuk kepentingan itu pula pemerintah Orde Baru hendak membuat undang-undang

otonomi daerah yang lebih adil, sehingga nantinya akan terjadi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang wajar, sekaligus dapat makin memantapkan integritas nasional bangsa.

Sudah menjadi itikad bangsa untuk menolak gagasan demokrasi liberal yang mendewakan kebenaran formal dengan *majority rule* dan juga menolak demokrasi terpimpin yang memungkinkan kekuasaan mutlak penguasa maupun diktator mayoritas.

Pembinaan politik adalah usaha dan upaya agar rakyat banyak dapat berpartisipasi positif dalam program pembangunan nasional. Kesadaran rakyat dalam bernegara secara kongkrit adalah melalui partisipasi di daerahnya masing-masing, memecahkan persoalan-persoalan yang secara riil dihadapi.

Dalam menciptakan kondisi untuk pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha ini DPR dan pemerintah berusaha untuk menyusun Undang-undang otonomi daerah yang riil dan undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah yang adil dan wajar, yang sekaligus dapat makin memantapkan integritas nasional dan integritas bangsa yang sedang membangun...

Dengan sendirinya alam pemikiran yang berorientasi pada program pembangunan harus tertuang dalam pola struktur politik. Infrastruktur politik yang berorientasi pada ideologi golongan tidak sesuai lagi dengan pola yang diperlukan bagi pembangunan. Infrastruktur demikian telah terbukti dalam sejarah bangsa tidak dapat mengemban tuntutan rakyat, sedangkan sudah jelas dari semula bahwa ideologi negara adalah Pancasila.

Untuk kepentingan pembangunan bangsa yang semakin terintegrasi tersebut, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penataan organisasi politik, yang diwujudkan dalam penyederhanaan partai politik, dari banyak partai politik hanya tinggal 2 saja, ditambah dengan Golongan Karya (Golkar). Dan itu sudah harus diwujudkan dalam Pemilu 1976:

Organisasi politik harus dapat merupakan organisasi yang konseptual, memberikan alternatif konsep-konsep yang baik dan benar. Dengan sendirinya, menjadi wajar bahwa dalam pembaharuan struktur politik, organisasi-organisasi politik perlu menyederhanakan dirinya, baik dalam jumlah maupun dalam strukturnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan bahwa dalam Pemilu di tahun 1976 yang akan datang hanya terdapat 3 tanda gambar, yakni dua dari kelompok partai, dan satu dari Golkar.

Penyederhaan partai pun masih belum cukup bagi penataan politik yang ‘tertib’. Masih ada hal lain yang harus dilakukan, yaitu, memisahkan masyarakat dari aktivitas politik sehari-hari dengan satu kebijakan yang disebut ‘floating mass’. Moertopo mengatakan bahwa, sejarah politik orde lama mengajarkan betapa keterlibatan masyarakat yang terlalu kuat dalam aktivitas politik, telah ‘menyebabkan kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari kebutuhannya akan kemajuan dan perbaikan hidup baik material maupun spiritual menjadi terabaikan’. Karena menurutnya, pada dasarnya, masyarakat Indonesia ‘belum cukup rasional’. Sudah selayaknya bila rakyat yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan ‘yang belum cukup rasional’ itu dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan ideologi sempit, dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing, dan kegiatan partai politik dibatasi sampai daerah tingkat II. Di sinilah, menurut Moertopo, letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi bagi desa-desa. Berikut pernyataan Moertopo:

...di masa-masa yang lalu rakyat umumnya, lebih-lebih di desa-desa dengan alam pemikirannya yang belum cukup rasional telah banyak terombang-ambing dan terlibat dalam pertentangan-pertentangan politik dan ideologi sempit antara partai-partai politik yang secara sempit berorientasi pada ideologi masing-masing. Partai-partai politik itu senantiasa berusaha menghimpun kekuatan massa melalui pembentukan berbagai organisasi afiliasi atas dasar ideologi partai-partai induknya. Massa rakyat, khususnya di desa-desa selalu menjadi korban kepentingan politik dan kepentingan ideologi partai-partai yang bersangkutan. Terlibatnya mereka dalam pertentangan kepentingan politik dan ideologi sempit telah menyebabkan kepentingan yang menyangkut kehidupan mereka sehari-hari kebutuhannya akan kemajuan dan perbaikan hidup baik material maupun spiritual menjadi terabaikan.

Keadaan semacam ini hendaknya tidak terulang lagi. Oleh karena itu mengingat bahwa, bahkan hingga kini orientasi pada ideologi sempit itu pun belum seluruhnya ditinggalkan oleh partai-partai politik sudah selayaknya bila rakyat yang sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaan dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan ideologi sempit, dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional, antara lain melalui pembangunan masyarakat desanya masing-masing. Untuk itu wajarlah bila kegiatan partai politik dibatasi sampai daerah

tingkat II. Di sinilah letak makna dan tujuan dari proses depolitisasi dan deparpolisasi bagi desa-desa.

Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa rakyat di desa-desa tidak bisa mempunyai aspirasi-aspirasinya sendiri termasuk aspirasi politik. Di samping kesempatan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka ke arah pembangunan masyarakatnya sendiri dalam pemilihan umum, mereka dapat menentukan pilihan pada golongan-golongan baik partai politik maupun Golkar yang dipandangnya mampu untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan yang mempunyai program perjuangan dan program pembangunan sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka.

Dengan demikian rakyat di desa-desa tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaganya yang berharga untuk melibatkan dirinya dalam kancah perjuangan politik partai dan golongan tetapi menyibukkan diri dalam usaha-usaha pembangunan sehingga didapatkanlah apa yang dapat disebut sebagai *floating mass*, yang tidak terikat secara permanen dalam keanggotaan sesuatu partai politik. Di samping dapat diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan *floating mass* ini akan merupakan dorongan pula bagi kekuatan-kekuatan sosial politik untuk mempersiapkan program pembangunan yang akan ditampilkan dan dinilai dalam pemilihan umum dan golongan yang mempunyai program pembangunan yang menyangkut kepentingan umum akan menang dalam pemilihan umum.

Satu tahap penting lain yang ditegaskan Moertopo di dalam tulisannya tersebut adalah betapa Golkar adalah jawaban atas semua 'proyek modernisasi politik' yang dimaksudkannya itu. Golkar adalah 'pembaharu yang membawa iklim politik yang ada kepada bentuk baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dan Golkar adalah koalisi segala kekuatan 'yang baik' seperti kelompok profesional/fungsional, PNS, ahli/sarjana, dan ABRI. Inilah satu tahap akhir dari proses 'modernisasi' merupakan suatu 'perubahan yang direncanakan' (planned change), yang merupakan 'suatu keharusan' yang tak mungkin dihindari di dalam masyarakat Indonesia, yang sedang bergerak dari tipologi masyarakat '*paguyuban*' kepada masyarakat '*patembayan*'. Berikut pernyataan Moertopo:

Dalam rangka ini telah muncul Golkar sebagai suatu kekuatan yang diharapkan dapat menjadi unsur pembaharu yang mampu membawa iklim politik yang ada kepada bentuk baru sesuai dengan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembangunan.

Usaha Golkar ini didukung oleh unsur-unsur pembaharu yang terdiri dari kelompok-kelompok profesi/fungsional, komponen-

komponen pegawai negeri, para ahli/sarjana, massa rakyat yang nonpartai serta ABRI sebagai salah satu komponen pembaharuan ini. Sebagai unsur pembaharu, Golkar sendiri tidak terlepas dari proses pembaharuan. Maka jelaslah bahwa struktur politik yang dipolakan demikian akan mengubah dimensi tata gerak unsur-unsur politik, sehingga atas dasar pengertian bahwa politik adalah pengabdian, bentuk kehidupan politik itu makin dapat ditataselaraskan kepada bentuk-bentuk kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Semakin bentuk-bentuk itu mendekat semakin tepat struktur politik itu...

Pembangunan menuntut terjadinya pengelompokan yang lebih riil, lebih efektif dan lebih efisien, dan telah merupakan konsensus nasional bahwa titik berat dalam institusionalisasi masyarakat yang sedang membangun adalah pengelompokan berdasarkan kekerajaan atau profesi. Dalam bentuk inilah kiranya masyarakat menyelenggarakan partisipasinya tanpa melupakan hakikatnya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Latar belakang yang terlampaui bersimpangsiur, orientasi yang tidak memenuhi tuntutan zaman seperti yang masih banyak berlaku di Indonesia-dimana formalitas lebih dipentingkan daripada fungsinya- menyebabkan demokrasi tidak pernah berfungsi dengan baik. Penataan ulang institusi masyarakat seiring kemajuan zaman tidak berkembang dengan otomatis, terutama apabila hal itu dihasilkan oleh persilangan dengan kebudayaan lain seperti halnya kehidupan kepartaian yang merupakan bentuk pengaturan yang dikenal dari masyarakat Barat. Pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan dalam modernisasi dapat dianggap merupakan spesialisasi-spesialisasi. Pada dasarnya pergeseran pengelompokan ke arah ini telah terjadi dalam masyarakat Indonesia dari bentuk *paguyuban* ke arah *patembayan*.

Dari teks yang ditulis oleh Ali Moertopo tersebut, dalam konteks bangunan nasionalisme Indonesia, bisa diambil beberapa poin penting. Pertama, Orde Baru terobsesi untuk membangun satu Negara yang modern sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk keperluan itu Orde Baru sanggup membayar harga yang harus dibayar, termasuk terjadinya konflik norma-norma di tengah masyarakat. Kedua, sebagai implementasi dari proses modernisasi, Orde Baru bertekad untuk melakukan penertiban dan reorganisasi politik, diantaranya adalah penyederhanaan partai, penghapusan politik aliran dan penetapan asas tunggal. Ketiga, depolitisasi rakyat. Keempat, menegakkan 'koalisi pembaruan' dengan Golkar sebagai pilar utamanya. Dengan demikian Nasionalisme Indonesia, oleh Orde dimaknai sebagai, modernisasi, penguatan dan sentralisasi politik di tangan pemerintah, dan depolitisasi rakyat. Hanya di atas dasar yang demikianlah, Orde Baru dapat menjalankan pembangunan bangsa dan Negara.

C. Negara Kekeluargaan: Membaca Ide Abdul Kadir Besar

Dibanding nama Soeharto dan Ali Moertopo, nama Abdul Kadir Besar relatif kurang dikenal masyarakat. Ia adalah seorang ahli militer yang terkemuka, ahli hukum dan penulis pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Dilahirkan di Magelang Jawa Tengah, Kadir lulus dari Akademi Hukum Militer tahun 1958 dan Sekolah Tinggi Hukum Militer pada 1963. Pada tahun 1960-an, ia bekerja bersama Jendral Nasution pada 1960-an, pertama sebagai asisten Intelijen pada Direktorat Strategi Sosial Politik Angkatan Bersenjata. Tahun 1967-1972 ia menjadi Sekjen MPRS. Ia kemudian mengajar di Sesko ABRI. Pada akhir tahun 70-an ia berseberangan pandangan dengan Soeharto, dan menghabiskan masa pensiunnya dengan mengajar di Lemhanas, UGM Yogyakarta dan Universitas Indonesia. (Bourchir & Hadiz, 2006: xv)

Dalam tulisan yang dibuat tahun 1968 ini, ada beberapa hal menarik yang menggambarkan pemahaman penulisnya akan makna negara kekeluargaan, yang sangat mirip dengan pandangan Soepomo. Ia berangkat dari argumentasi yuridis bahwa tak bisa dipungkiri landasan pokok UUD 1945, adalah menganut *staatsidee* kekeluargaan. Ini pula yang menjadi dasar pembenaran bagi teori negara 'integralistik', dimana negara dipandang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan yang ada di tengah masyarakat. Paham ini, menurut Kadir, benar-benar sesuai dengan prinsip 'ketimuran'. Kadir mengatakan:

UUD1945 menganut *staatsidee* kekeluargaan. Inilah yang menjadi pangkal tolak dari sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 menganut *staatisdee* kekeluargaan (yang dalam ilmu negara dikenal dengan istilah teori integralistik), yaitu suatu pengertian tentang negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan yang ada dalam segala lapangan kehidupan. (Soepomo dalam Yamin 1959:113) ...Prinsip-prinsip yang dikandung dalam *staatsidee* kekeluargaan adalah: prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsip persatuan dalam negara, dan hal ini seluruhnya sesuai dengan aliran pikiran ketimuran (termasuk Indonesia).

Menarik bahwa, yang menjadi ‘titik tekan’ Kadir dalam memaknai ‘negara kekeluargaan’ adalah pada kata ‘seluruh’. Dengan makna ‘seluruh’ sebagai substansi *staatsidee* negara kekeluargaan UUD 1945, maka kehendak ‘mayoritas’ rakyat pun belum cukup untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan politik. Kehendak ‘mayoritas’ berarti bukan kehendak ‘seluruh’ rakyat, karena masih ada ‘sebagian’ atau ‘minoritas’ rakyat yang belum terakomodir. Jika diletakkan dalam tata pemerintahan, misalnya dalam lembaga MPR, maka jika keputusan lembaga tersebut ingin dikatakan sesuai dengan *staatsidee* negara kekeluargaan UUD 1945, maka keputusan yang diambil pun harus melalui suatu musyawarah mufakat yang bulat atau yang biasa disebut aklamasi. Voting, yaitu cara pengambilan berdasarkan suara terbanyak dianggap tidak sesuai dengan *staatsidee* negara kekeluargaan, melainkan tradisi liberalisme Barat. Berikut argumentasi Kadir mengenai hal tersebut:

Staatsidee kekeluargaan membawa konsekuensi pada pengertian kehendak rakyat, yaitu bahwa yang dimaksud dengan kehendak rakyat adalah kehendak dari seluruh rakyat, mencakup segenap aspirasi sosial-politik yang hidup di kalangan rakyat, kepentingan daerah dan kepentingan golongan, bukan kehendak mayoritas rakyat saja seperti halnya dalam negara demokrasi berdasarkan *staatsidee* individualisme dan bukan kehendak minoritas saja yang mengatasmakan kolektivitas seperti halnya dengan negara-negara totaliter berdasarkan *staatsidee* kelas...

Negara Republik Indonesia yang menganut paham bahwa kehendak rakyat adalah kehendak dari *seluruh* rakyat, keanggotaan lembaga tersebut yaitu MPR harus mencerminkan *penjelmaan seluruh rakyat*. Dalam terminologi *staatsidee* kekeluargaan berarti bahwa segenap anggota keluarga Bangsa Indonesia harus ada dalam MPR.

Kemutlakan adanya utusan-utusan daerah dan utusan-utusan golongan dalam MPR adalah konsekuensi dari *staatsidee* kekeluargaan yang dianut oleh UUD 1945...

Berdasarkan *staatsidee* kekeluargaan maka dalam kehidupan kenegaraan Indonesia hanya ada satu rumusan kehendak rakyat dan dilembagakan menjadi garis-garis besar haluan negara (disingkat GBHN), dan untuk merumuskan serta menetapkan GBHN tersebut perlu dipenuhi dua syarat, yaitu: *qua forum* harus yang mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, dalam hal ini adalah MPR karena keanggotaannya telah mencakup seluruh ‘anggota keluarga’ yaitu golongan politik, golongan daerah dan golongan karya; *qua cara* mengambil keputusan dalam menetapkan GBHN haruslah dengan mufakat bulat karena apabila sekadar dengan keputusan suara mayoritas

berarti ada kehendak dari minoritas rakyat yang tidak masuk dalam GBHN yang pada gilirannya berarti GBHN *bukan* merupakan kehendak *seluruh* rakyat, hal mana bertentangan dengan pengertian 'kehendak rakyat' berdasarkan *staatsidee* kekeluargaan, melainkan sama dengan pengertian 'kehendak rakyat' berdasarkan *staatsidee* individualisme.

Dari tulisan Abdul Kadir Besar tersebut, dapat diambil dua pokok pemikiran penting berkaitan dengan gagasan Nasionalisme Indonesia yang hendak diusung Oleh Orde Baru. Yaitu, pertama, bahwa ia hendak menegaskan kembali bahwa *staatsidee* yang mendasari UUD 1945 dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia adalah Negara kekeluargaan, yang berimplikasi pada penerimaan atas bentuk Negara Integralistik. Sebagai kelanjutannya maka, kedua, dalam setiap pengambilan keputusan politik kenegaraan haruslah ditempuh musyawarah secara mufakat yang bulat, bukan voting. Karena voting bukanlah tradisi yang dibenarkan oleh paham Negara integralistik. Inilah konsepsi negara kekeluargaan versi Abdul Kadir Besar yang merupakan salah seorang tokoh Orde Baru.

D. Menegakkan Demokrasi: Membaca Ide Soeharto

Sejarah mencatat bahwa rezim yang dibangun oleh Orde Baru Soeharto adalah rezim otoriter, bahkan Dhakidae (2003) menyebutnya sebagai rezim fasis. Anggapan Dhakidae tampaknya tidaklah berlebihan, mengingat argumen-argumen politik yang dijadikan pijakan bagi kebijakan Orde Baru yang memang sangat otoriter. Mulai dari kebijakan fusi partai politik, asas tunggal, dwifungsi ABRI, normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK), hingga monoloyalitas, semua bermuara pada anggapan tentang 'keluarga besar' dan 'integralisme' yang menjadi basis dasar aliran politik Organisme Soeharto ini. Tetapi menarik bahwa Soeharto selalu mengatakan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya mengakui demokrasi dan menghormati konstitusi. Pada awal Januari 1972, dalam acara peresmian Rumah Sakit Pertamina di Jakarta,

Soeharto menyampaikan pidato⁴ yang cukup keras mengemukakan pandangannya tentang demokrasi, menyusul protes mahasiswa menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah TMII. Dalam kesempatan itu, ia berkali-kali mengatakan bahwa, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi ia meminta jangan demokrasi digunakan berlebihan, karena hal itu akan menyebabkan terganggunya stabilitas dan akhirnya mengusik proses pembangunan bangsa. Soeharto mengatakan:

....Rakyat tidak boleh menggunakan hak-hak demokrasi mereka jika akhirnya malah menghasilkan kondisi yang tidak demokratis.

....Jika hak-hak demokrasi dilaksanakan terlampau jauh dilakukan tanpa kehati-hatian, demokrasi tidak akan ada lagi, dan strategi stabilitas yang penting bagi pembangunan akan berada dalam bahaya.

Soeharto mengecam para pengkritik pembangunan TMII, karena kritik-kritik tersebut ia nilai sudah berlebihan dan telah mengundang pro kontra di kalangan masyarakat. Pro kontra itu dikhawatirkan Soeharto akan menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban publik, dan mengganggu stabilitas nasional, serta pada akhirnya menghambat proses pembangunan. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan TMII adalah bagian dari upaya untuk memperkuat Nasionalisme Indonesia. Di samping ada sejumlah keuntungan ekonomi, pemberian lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat dan lain-lain, yang paling penting, menurut Soeharto, proyek TMII adalah upaya memperkuat nasionalisme Indonesia, dan memperkenalkan khazanah budaya Indonesia yang sangat kaya kepada publik internasional. Ia berargumen bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak mungkin mengunjungi seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Karena itu dengan mengunjungi TMII, masyarakat sudah bisa mengetahui kekayaan dan keragaman suku bangsa dan daerah lain yang ada di

⁴ Pidato disampaikan dalam acara peresmian Rumah Sakit Pertamina di Jakarta pada 6 Januari 1972, menyusul protes mahasiswa menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Edisi bahasa Inggris pidato ini diambil dari transkrip resmi dalam Smith (1974: 235-40) Beberapa pemimpin geraka mahasiswa ditangkap segera setelah pidato ini disampaikan. (Direproduksi dalam Bouchier & Hadiz, 2006: 67-74)

seluruh Indonesia. Untuk itulah keberadaan TMII merupakan proyek yang harus dijalankan, dalam rangka memperkuat nasionalisme Indonesia:

Konflik antara kelompok yang pro dan kontra dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban publik dan mengganggu stabilitas nasional. Hal ini akan melahirkan hambatan bagi pembangunan...Proyek Taman Mini Indonesia Indah memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, keluar ditunjukkan untuk menjadi alat komunikasi, untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain, untuk menunjukkan kepada mereka cita-cita yang sesungguhnya dari perjuangan rakyat Indonesia, dan sifat Pancasila, yang mencerminkan falsafah hidup mereka.

...jika kita ingin berperan dalam membangun perdamaian dunia, kita harus dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Agar bisa dipercaya, dihormati, disukai kita harus membuat kepribadian Indonesia dikenal, yang untuk itu kita perlu merunutnya ke belakang mulai dari abad ke-8.

Kedua, ada fungsi yang ditunjukkan ke dalam. Rakyat Indonesia tidak mungkin mengunjungi seluruh bagian Indonesia—Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Irian, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Itu tidak mungkin. Namun dengan mengunjungi proyek Taman Mini ini, mereka akan dapat melihat seluruh negara ini, dan juga memiliki rasa bangga menjadi sebuah bangsa, sebuah bangsa yang benar-benar kaya budayanya, alamnya, kaya flora dan faunanya, dan kaya dengan berbagai bentuk kesenian dan sebagainya. Itu akan menciptakan kesadaran berbangsa. Kesadaran berbangsa ini mutlak

Selain itu, proyek ini memiliki fungsi selanjutnya: pembangunan ekonomi. Ada banyak orang dari negara-negara lain yang ingin melihat Indonesia, melihatnya dari dekat. Oleh karena itu, kita harus mengeksploitasi situasi ini. Kita perlu memperhatikan negara-negara lain. Untuk pembangunan kita memerlukan perdagangan luar negeri, kita memerlukan devisa. Jika kita mendatangkan turis asing, kita juga mendatangkan devisa. Inilah yang dilakukan negara-negara lain, seperti Italia, Spanyol, Swiss, dan Jepang. Dari pariwisata saja kita bisa memperoleh devisa lebih daripada Rp 1 milyar. Ini lebih banyak daripada hasil dari seluruh ekspor kita, minyak dan barang-barang lain. Mengapa kita tidak bisa memperoleh keuntungan yang demikian ini dari keindahan Indonesia jika saya yakin bahwa masyarakat negara-negara lain ingin melihat negara kita?

Aspek lain dari Taman Mini Indonesia Indah, jika proyek ini bisa dilaksanakan adalah keuntungan sampingannya; lapangan pekerjaan, tidak hanya di dalam proyek itu sendiri, tetapi juga di bidang-bidang lain, misalnya melayani pengunjung dan menjual eskrim, kacang, rokok, dan lain-lain. Semua kegiatan sekunder ini akan tersedia bagi masyarakat, oleh karena itu, proyek ini akan menyumbang bagi penyediaan lapangan kerja. Jadi, dilihat dari segi tujuan dan cita-cita, proyek ini tidak bertentangan dengan strategi perjuangan bangsa untuk

mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Proyek ini juga tidak bertentangan dengan strategi pembangunan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan kemerdekaan kita dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Proyek ini juga tentu saja tidak akan mempengaruhi keuangan

Soeharto kemudian beralih argumen dengan menuduh para pengkritik pembangunan TMII sebagai berupaya menggerogoti kekuasaan politiknya, dengan mengangkat masalah TMII sebagai sasaran antara saja, sementara sasaran pokoknya adalah dirinya sendiri sebagai Presiden Indonesia. Dan ia secara terus terang mencurigai para pengkritik tersebut adalah bagian dari kekuatan lama (komunisme dan orde lama), yang hendak mencari gara-gara. Bahkan Soeharto mengaitkan para pengkritik TMII sebagai berupaya menggusur ABRI dari perpolitikan nasional. Karena itu sudah semestinya ABRI-lah yang menjawab langsung terhadap kritik-kritik tersebut. Jika keinginan para pengkritik tersebut adalah benar hendak menyingkirkan ABRI dari perpolitikan nasional, Soeharto menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi. ABRI tidak akan menyerahkan dwifungsi mereka. Di atas dasar dwifungsi ini, ABRI—bersama-sama dengan kekuatan sosial lain—akan mampu menjaga UUD 1945 dan demokrasi kita. Bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain itu, ABRI akan menempati posisi-posisi eksekutif dan legislatif. Berikut penegasan Soeharto:

Taman Mini digunakan untuk menciptakan isu politik.

Lihatlah kenyataannya. Lihatlah pola kontroversi sejak 1968 dan 1969. Caranya mengangkat isu persis sama seluruhnya, selalu memelintir masalah ke arah yang berlawanan, menciptakan opini-opini antagonis dan kontraproduktif dan membingungkan masyarakat. Tujuan dasarnya adalah mendiskreditkan pemerintah. Selain itu, sebagaimana terjadi, orang-orangnya sama juga. Pelaku-pelakunya sama, dan saya tahu bahwa orang-orang yang di belakang layar juga sama.

Apa tujuan politik mereka yang sebenarnya? Kita tahu apa itu, dan itu bukanlah proyek Taman Mini. Tujuan yang sebenarnya, dalam jangka pendek, adalah mendiskreditkan pemerintah dan juga, tentu saja, orang yang bertanggungjawab, saya sendiri, sebagai kepala pemerintahan dan presiden. Sedangkan dalam jangka panjang mereka ingin mendepak ABRI keluar dari aktivitas eksekutif dan mengakhiri

dwifungsi ABRI. Mereka ingin mendorong ABRI kembali ke 'baraknya', yakni, membatasi mereka pada fungsi keamanan saja.

Jika itu targetnya, bukan proyek Taman Mini yang berhak menjawab kecaman-kecaman mereka. Jawabannya harus diberikan oleh ABRI, dan jawaban ABRI sangat jelas. Sebagaimana telah saya katakan berulang kali, ABRI tidak akan menyerahkan dwifungsi mereka. Di atas dasar dwifungsi ini, ABRI—bersama-sama dengan kekuatan sosial lain—akan mampu menjaga UUD dan demokrasi kita. Bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain itu, ABRI akan menempati posisi-posisi eksekutif dan legislatif.

Di sini kemudian tampak kontradiktif ketika Soeharto berulang-ulang menekankan tekadnya untuk menjaga konstitusi, menegakkan UUD 1945 dan demokrasi tetapi pada saat yang sama ia dengan nada yang sangat keras menyatakan akan siap menindak orang atau kelompok yang mencoba terus mengiritik dan menggunakan 'hak demokrasi secara berlebihan'. Terhadap mereka, Soeharto memperingatkan bahwa ia tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas. Tegas yang dimaksud Soeharto tampaknya adalah berarti 'penghancuran' sebagaimana yang telah pernah ia lakukan pada 1 Oktober 1965 ketika ia menumpas PKI. Hal itu tampak karena ia kemudian menceritakan betapa sikap yang pernah ia ambil pada saat itu, sangat krusial dalam kehidupannya. Saat itu tidak ada satu pun kelompok atau orang yang mendukung dirinya untuk mengambil satu inisiatif, kecuali satu orang, yaitu istrinya sendiri, Tien Soeharto. Dan hanya dengan dukungan satu orang itulah ia telah berani mengambil sikap tegas menumpas PKI hingga akar-akarnya, dan itu berhasil. Kini ini merasa seperti ditantang untuk mengambil sikap yang sama. Karena itu ia menegaskan bahwa ia akan mempergunakan sikap yang sama untuk menghadapi para pengkritik yang berlebihan tersebut jika diperlukan. Bahkan di akhir pidatonya, ia mengancam hendak menggunakan status 'negara dalam bahaya' (SOB) jika hal itu memang diperlukan, dengan pertanggungjawaban yang langsung kepada Tuhan. Inilah pernyataan Soeharto saat itu:

...izinkan saya mengingatkan satu hal kepada mereka. Segala sesuatu harus dilakukan secara konstitusional! Tujuan Orde Baru secara khusus dalam menegakkan UUD dan demokrasi. Jika kecenderungan-kecenderungan yang inkonstitusional muncul, saya akan kembali pada

sikap yang saya ambil pada 1 Oktober 1965 ketika saya mengabdikan rakyat dengan melawan PKI yang ingin menginjak UUD dan Pancasila.

Pada saat itu tidak ada orang yang datang kepada saya untuk mendorong saya, apakah para pemimpin partai politik menawarkan dukungan kepada saya? Tidak. Tidak ada juga dari kelompok-kelompok pemuda yang datang. Tidak ada juga yang dari kalangan mahasiswa. Namun saya tidak peduli, siapa yang di belakang saya. Pada kenyataannya hanya ada satu orang, istri saya. Dengan enteng dia berkata kepada saya, 'teguhlah dalam keyakinanmu'. Itulah pesan istri saya kepada saya pada 1 Oktober. Itu adalah dorongan bagi saya dan memberikan saya kekuatan yang cukup untuk mendorong rakyat agar mengalahkan PKI.

Bertindak sesuai UUD adalah masalah prinsip bagi saya. Karena semua koreksi harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, Sidang Istimewa dan Sidang Umum MPRS diadakan, dan seterusnya. Segala sesuatu dilakukan secara konstitusional sehingga rakyatlah yang menentukan. Tanggungjawab saya adalah menjamin agar perubahan-perubahan tidak dilaksanakan dengan cara-cara inskonstitusional. Dan syukur alhamdulillah saya berhasil.

...jika ada orang-orang yang mencoba bertindak menyimpang dari konstitusi saya akan kembali kepada sikap yang saya ambil pada 1 Oktober 1965. Sangat jelas saya akan menghantam mereka, siapapun mereka, dan saya pasti akan mendapatkan dukungan penuh ABRI dalam hal itu.

Dan itu juga akan berlaku bagi mereka yang memanfaatkan hak-hak demokrasi mereka dan menggunakannya sebagai kedok yang menggunakan hak-hak mereka secara berlebihan semau mereka. Hak-hak itu adalah seperti bumbu, jika digunakan berlebihan akan merusak semuanya. Dan jika perusakan demokrasi akan mengakibatkan gangguan ketertiban dan situasi keamanan umum, gangguan stabilitas nasional dan gangguan pembangunan, itu tidak akan saya biarkan. Supaya anda mengerti apa yang saya maksudkan dengan "Saya tidak akan membiarkannya", ijinkan saya mengatakan dengan terus terang bahwa saya akan mengambil tindakan. Jika orang-orang itu tidak mengindahkan peringatan-peringatan ini dan terus bertindak seperti yang mereka lakukan, saya akan mengambil tindakan. Dan jika ada ahli-ahli hukum yang memiliki keyakinan bahwa presiden tidak bisa lagi melakukan itu, bahwa akan bertentangan dengan hukum jika saya bertindak melawan mereka yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan-penyimpangan ini—jika mereka keras kepala dengan itu-baiklah, gampang saja. Demi kepentingan negara dan bangsa, saya dapat menggunakan Surat Perintah Sebelas Maret 1966, untuk menetapkan Negara dalam Keadaan Darurat. Jika perlu, saya bisa melakukan itu bahkan tanpa adanya keadaan darurat. Jika orang-orang itu akan terus menciptakan kekacauan, saya akan menjadikannya alasan untuk bertindak, dalam tanggungjawab saya terhadap rakyat dan Tuhan.

Cukup jelas bahwa Soeharto hendak mengkonstruksi wacana nasionalisme Indonesia sebagai semangat membangun negara yang 'demokratis' dan 'konstitusional', tetapi dalam pengertiannya sendiri. Yaitu suatu negara demokratis yang tertib, yang warganya 'tidak berlebihan' menggunakan hak demokrasinya, yang pada praktiknya itu berarti pemberangusan terhadap hak menyatakan pendapat. Suatu kontradiksi? Tampaknya demikian. Karena setelah pidato tersebut, sejumlah mahasiswa dan para aktivis ditangkap dan diadili. Secara diskursif, pidato Soeharto tersebut memang bisa dipahami dalam kerangka 'ideologi pembangunan' Orde Baru yang didasarkan pada tiga pilar, yang biasa disebut Trilogi Pembangunan, yaitu; pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan pemerataan pendapatan. (Budiman & Tornquist, 2001: xxxv). Dengan pemahaman yang masih sama, dapat dilihat bahwa munculnya kasus-kasus di berbagai daerah juga dihadapi dengan cara yang 'tegas' seperti dalam kasus Kedungombo (1989), kasus Nipah Madura (1993), kasus Pemogokan Buruh di Medan (1994), Pemberedelan Editor, Tempo dan Detik (1994), kasus Amungme di Irian Jaya (1996), dan kasus PDI (1996), sebagai perwujudan 'demokrasi' yang hendak dikembangkan oleh Soeharto. Inilah kurang lebih gambaran nasionalisme Indonesia versi Soeharto, yaitu nasionalisme yang membangun, dan dikontrol secara langsung oleh kekuatan militer secara sentralistis dan tanpa kritik.